

ABSTRAKSI

PERANAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK-RI) PERWAKILAN DI MEDAN DITINJAU DARI SEGI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

OLEH

VERRY JULIMAN DAELY

NIM : 02 840 0077

BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Pembahasan skripsi ini menyangkut sekitar fungsi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan di Medan di dalam melakukan tata kerja serta kewenangannya terutama dalam hal memberikan pengawasan dan pertanggung jawaban atas keuangan daerah.

Pembahasan skripsi ini mengajukan permasalahan bagaimana fungsi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan di Medan dalam hal pelaksanaan pengawasan, serta apa saja yang menjadi hambatan di dalam pelaksanaan tugas dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan di Medan.

Untuk mendukung pelaksanaan pembahasan skripsi ini maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan di Medan.

Setelah dilakukan pembahasan dan penelitian maka diketahui aspek hukum dalam proses pelaksanaan pengawasan administrasi keuangan daerah suatu proses pengamatan kegiatan pelaksanaan administrasi keuangan di dalam suatu instansi pemerintah untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditentukan sebelumnya. Sedangkan aspek hukumnya meletakkan pelaksanaan pengawasan administrasi keuangan tersebut dijalankan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan apabila dalam pelaksanaan pengawasan ini menemukan keganjilan ditindak lanjuti sebagaimana pula ditentukan perundang-undangan. Fungsi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan di Medan dalam hal pelaksanaan pengawasan adalah fungsi yang diberikan oleh undang-undang untuk mengadakan dan melakukan suatu pengawasan terhadap segala hal mengenai pekerjaan pemerintah daerah di wilayah tugasnya baik urusan rumah tangga daerah maupun mengenai urusan tugas pembantuan. Karena sifat pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan di Medan adalah pengawasan yang datangnya dari luar (extern control) terhadap komponen-komponen yang merupakan objek pengawasannya di lingkungan Pemerintah Daerah maka pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan di Medan perlu mengetahui rencana maupun program yang akan dilakukan tiap unit-unit organisasi yang akan dikenakan pengawasan. Dengan demikian unit-unit tersebut dapat membuat program kerja yang baik.